

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir, I. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP Indonesia.
- Arief, B. N. (1994). *Teori-teori Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- _____. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda, N. A. (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harahap, Y. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husein, H. (1991). *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kanter, E. Y. dan Sianturi, S. R. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Leden Marpaung. (1991). *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan, M. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- _____. (2014). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Musthafa, A. & Ruben A. (1983). *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, S.S., dkk. (2019). *Hukum Litigasi Bencana di Indonesia*. Jawa Tengah: Lakeisha.
- Peter R. S. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pudi, G. R. (2007). *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Saharjo, B.H. (2003). *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari Perluah Dilakukan*. Departemen Silviculture. Fakultas Kehutanan.
- Soekanto, S. (2012). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriyadi. (2011). *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Tubbs, S. L. & Sylvia, M. (2005). *Human Communication: Konteks-Konteks Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wiyono, R. (2006). *Pengadilan Hak Asasi manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Zainal, A. F. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kapolri No 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan POLRI.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

C. Sumber Lain

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Karhutla Monitoring Sistem, http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran, diakses pada tanggal 4 September 2022 pukul 12:17 WIB.

Polres Bintan, <https://www.polresbintan.com/>, diakses pada tanggal 29 Januari 2023 pukul 15.24 WIB.